

PENGARUH INFLASI, PENDUDUK PRODUKTIF DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN BULUKUMBA

Nur Ainun Resky¹

Abdul Wahab²

Rizka Jafar³

Email: ainunrsky03@gmail.com

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

In an autonomous region, Regional Original Income or Penerimaan Asli Daerah (PAD) is a substantial source of revenue that may be used for both regular finance and development financing. When a nation strives to raise its national income, one of the challenges it must contend with over the long run is economic growth. This research aims to investigate the impact of local income and economic development by factors such as the inflation rate, the proportion of working age population, and the amount of government spending. The results of this study indicate that inflation, the number of productive age population, and government spending had a significant effect on PAD. Partially the inflation rate and the number of productively age population did not significantly affect PAD and government spending, while they revealed a significant effect on PAD. Simultaneously, inflation, the number of productively age population, and government spending did not have an impact through economic growth.

Keywords: *inflation, population productive, government spending, PAD, economic growth*

ARTICLE INFO

Received: 26 Desember 2022

Accepted: 12 Mei 2023

Online: 15 Mei 2023

*Correspondence: Annisa
Abdullah

E-mail: ainunrsky@gmail.com

ABSTRAK

Di daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang cukup besar yang dapat digunakan baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Ketika suatu negara berusaha untuk meningkatkan pendapatan nasional riilnya, salah satu tantangan yang harus dihadapinya dalam jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah dan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat inflasi, penduduk usia kerja, dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder periode 2005-2021 di Kabupaten Bulukumba. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, jumlah penduduk usia produktif dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial inflasi, jumlah penduduk usia produktif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan inflasi, jumlah penduduk usia produktif dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *inflasi, penduduk produktif, pengeluaran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi*

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang pada UU No. 9 Tahun 2015, “Otonomi yang luas, murni, dan bertanggung jawab” merupakan konsep yang dilindungi konstitusi. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah diberi tanggung jawab dan kekuasaan untuk memajukan tujuan masyarakat secara transparan, inklusif, dan akuntabel. Hal ini menjelaskan bahwa UU No. 9 Tahun 2015 berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kemandirian, dan pelayanan. Otonomi daerah merupakan inti dari pemerintahan yang terdesentralisasi. Strukturnya berupa kebebasan untuk membuat penilaian seefektif mungkin dalam batas-batas kekuasaannya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap bakat yang dimiliki, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, adalah terus ditingkatkan.

Kebijakan pemerintahan daerah menawarkan peluang untuk mengubah paradigma pembangunan dari yang semula berfokus pada perluasan menjadi pemerataan menjadi lebih mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Setiap kabupaten dan kota sangat menekankan pelaksanaan otonomi daerah, yang diawali dengan penyerahan berbagai kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena kewenangan ini, pemerintah daerah sekarang berkapasitas mengawasi serta mengelola rumah tangganya sendiri dengan cara yang sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Karena kebebasan yang diberikan kepada daerah, setiap daerah bisa leluasa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan melalui potensi daerahnya masing-masing (Sania, 2018).

Kapasitas suatu daerah untuk mengembangkan PAD erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam menciptakan PAD, maka semakin besar pula keleluasaan daerah guna menerapkan PAD sesuai dengan tujuan, kebutuhan, serta prioritas pembangunan daerah. Salah satu persoalan yang dihadapi berbagai kabupaten/kota di Indonesia saat ini ialah perjuangan untuk meningkatkan PAD. PAD ialah salah satu sumber keuangan daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan BUMD, serta pendapatan lain yang sah semuanya berkontribusi terhadap pendapatan (Ariyani, dkk., 2018).

Namun, banyak daerah di Indonesia yang belum mampu menutupi seluruh belanja pemerintah daerah melalui PAD karena kontribusinya yang relatif kecil, serta masih banyak yang mengandalkan dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Karena kontribusinya yang relatif rendah dan masih mengandalkan pembayaran perimbangan dari pemerintah pusat, beberapa daerah di Indonesia belum dapat mendukung semua pengeluaran pemerintah daerah melalui PAD. Agar manfaat PAD dapat terwujud secara maksimal, pemerintah daerah harus dapat dipercaya dalam memilih industri yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan daerah.

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Perusahaan Milik Daerah	Lain-lain PAD yang Sah
2017	242.304.609.494	34.211.599.000	22.195.423.000	3.273.064.494	182.624.523.000
2018	200.080.565.506	45.798.866.000	24.771.860.000	3.657.435.565	125.852.403.941
2019	188.708.819.237	45.252.816.374	18.503.397.527	5.193.141.336	119.759.464.000
2020	168.422.009.341	31.138.613.050	14.387.214.516	4.840.892.279	118.005.284.495
2021	188.708.819.237	45.252.816.374	18.503.397.527	5.193.141.336	119.759.464.000

Sumber Data: BPS Bulukumba Dalam Angka 2022

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan PAD yang idealnya menjadi sumber utama belanja pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Daerah yang perkembangan ekonominya lebih baik memiliki peluang dalam mendapatkan peningkatan PAD. Hal demikian harusnya menghasilkan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan terhadap kemampuan ekonomi lokal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan hanya sekedar mengeluarkan kebijakan terkait pajak maupun retribusi (Desmawati dkk., 2015).

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, Tingkat Inflasi, Jumlah Angkatan Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	JAK (Jiwa)	Pengeluaran Pemerintah (Triliun Rupiah)
2017	6,89	4,66	193.449	1.322.588.737.134,00
2018	5,05	3,85	183.017	1.231.277.895.604,31
2019	5,49	2,25	199.431	1.270.119.793.960,28
2020	0,43	2,30	220.103	1.247.418.027.137,59
2021	4,76	2,16	212.606	1.328.420.346.013,49

Sumber Data: BPS Bulukumba Dalam Angka 2022

Karena pertumbuhan ekonomi diukur dengan peningkatan konsumsi masyarakat, inflasi saat ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga barang serta jasa, PAD juga dapat diakibatkan oleh inflasi yang meningkatkan harga barang serta jasa karena persepsi masyarakat terhadap pajak juga menaikkan harga di pasaran (Muslim dkk., 2019). Simanjutak dalam Husna (2015) mengemukakan bahwasanya inflasi dapat menambah jumlah PAD dimana penetapannya didasarkan oleh omset penjualan, misalnya yang terdapat pada pajak restoran maupun pajak hotel.

Salah satu aspek yang bisa berkorelasi pada Pendapatan Asli Daerah dan perkembangan ekonomi selain inflasi adalah jumlah penduduk usia produktif. Karena fungsi penduduk sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi, sangat berpengaruh terhadap kuantitas PAD. Banyaknya penduduk usia produktif akan ada banyak pula penduduk masyarakat untuk terus yang berbelanja, serta banyaknya jasa dan barang yang dikonsumsi di masyarakat maka mengakibatkan perkembangan suatu usaha yang ada di daerah tersebut akan semakin

lebih baik dan jumlah penduduk juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap PAD sehingga makin banyak jumlah penduduk maka PAD juga akan meningkat (Ariyani, dkk., 2018; Asmuruf, dkk., 2015). Pendapatan asli daerah akan meningkat sebagai akibat dari tren penduduk produktif yang terus meningkat (Perwira & Fattah, 2018).

Variabel terakhir untuk melihat pengaruh terhadap PAD adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. PAD bagi pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi di lingkungan tersebut. Aktivitas ekonomi masyarakat juga akan meningkatkan pendapatannya, yang berkorelasi pada peningkatan konsumsi serta PAD melalui sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, serta PAD lain yang dapat diterima (Husna, 2015).

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh inflasi, jumlah penduduk usia produktif, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan karakteristik *times series* yang disusun berdasarkan urutan waktu yang meliputi data perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, penduduk usia produktif, pengeluaran pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun 2005-2020. Sumber data berasal dari data sekunder dalam bentuk laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba.

Kerangka berpikir ini menjelaskan pertautan antara variabel independen dalam penelitian ini yaitu inflasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap variabel dependen dan variabel intervening yaitu pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Adapun variabel independen yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah tetapi melalui pertumbuhan ekonomi.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Jalur

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing variabel baik melalui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung dikarenakan terdapat variabel mediasi atau intervening dalam penelitian. Dengan demikian persamaan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \mu_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$\ln Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 Y_1 + \mu_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan: Y_1 adalah Pertumbuhan Ekonomi; Y_2 adalah Pendapatan Asli Daerah; X_1 adalah Inflasi; X_2 adalah Angkatan Kerja; X_3 adalah Pengeluaran Pemerintah; α , β adalah

Konstanta; dan μ_1, μ_2 adalah *Error Term*

Pengaruh langsung (*Direct Effect*)

Persamaan berikut menunjukkan pengaruh variabel $X_1, X_2,$ dan X_3 terhadap variabel $Y_2,$ serta pengaruh variabel $X_1, X_2,$ dan X_3 terhadap variabel Y_1 dan variabel Y_1 terhadap Y_2 :

Pengaruh variabel Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi

$$X_1 \rightarrow Y_1 = \alpha_1 X_1 \dots\dots\dots (3)$$

Pengaruh variabel Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

$$X_2 \rightarrow Y_1 = \alpha_2 X_2 \dots\dots\dots (4)$$

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

$$LnX_3 \rightarrow Y_1 = \alpha_3 LnX_3 \dots\dots\dots (5)$$

Pengaruh variabel Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$X_1 \rightarrow LnY_2 = \beta_1 X_1 \dots\dots\dots (6)$$

Pengaruh variabel Angkatan Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$X_2 \rightarrow LnY_2 = \beta_2 X_2 \dots\dots\dots (7)$$

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$LnX_3 \rightarrow LnY_2 = \beta_3 LnX_3 \dots\dots\dots (8)$$

Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$Y_1 \rightarrow LnY_2 = \beta_4 Y_1 \dots\dots\dots (9)$$

Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Persamaan berikut mengilustrasikan bagaimana variabel Y_1 bertindak sebagai intervening pengaruh variabel $X_1, X_2,$ dan X_3 terhadap Y_2 :

Pengaruh Inflasi (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1)

Pengaruh tidak langsung $X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow LnY_2 = \alpha_1 X_1 \times \beta_4 Y_1$
 Total pengaruh tidak langsung $LnY_2 = \beta_1 X_1 + (\alpha_1 X_1 \times \beta_4 Y_1) \dots\dots\dots (10)$

Pengaruh Angkatan Kerja (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1)

Pengaruh tidak langsung $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow LnY_2 = \alpha_2 X_2 \times \beta_4 Y_1$
 Total pengaruh tidak langsung $LnY_2 = \beta_2 X_2 + (\alpha_2 X_2 \times \beta_4 Y_1) \dots\dots\dots (11)$

Pengaruh pengeluaran pemerintah (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y_2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y_1)

Pengaruh tidak langsung $LnX_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow LnY_2 = \alpha_3 LnX_3 \times \beta_4 Y_1$

$$\text{Total pengaruh tidak langsung } \ln Y_2 = \beta_3 X_1 + (\alpha_3 \ln X_3 \times \beta_4 Y_1) \dots\dots\dots (12)$$

Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis

Tujuan pengujian hipotesis tipikal adalah untuk menunjukkan model akurat dari fakta-fakta yang mendukung analisis regresi linier. Untuk melihatnya dengan cara lain, model yang direalisasikan tidak boleh menyimpang dari hipotesis. Uji hipotesis meliputi uji autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

Uji normalitas adalah sejenis metode pendeteksian yang menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dari metode deteksi ini adalah untuk menentukan apakah model itu akurat atau tidak.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antar variabel bebas (independen). Dikatakan adanya gejala multikolinearitas jika terjadi hubungan dari antar faktor-faktor yang dimaksud sehingga dampaknya akan sulit untuk melihat dampak dari faktor independen terhadap variabel dependen. Analisis terhadap punya atau tidak punya gejala multikolinearitas dilakukan dengan metode *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan aturan: jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka ada multikolinearitas, namun jika VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas (Supriyadi dkk., 2017).

Uji Heteroskedastisitas adalah varians variabel pada model tidak sama atau konstan. Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk melihat apakah pada model ada ketidaksamaan varians pada residu, dimana pada analisis tidak boleh ada masalah pada grafik heteroskedastisitas. Konsekuensi dari terdapatnya heteroskedastisitas pada analisis adalah estimasi yang diperoleh tidak efisien. Untuk mengetahui terdapat heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan grafik dalam menganalisisnya (Sari, 2012).

Uji Autokorelasi menyiratkan bahwa ada hubungan antara individu-individu contoh yang diatur oleh waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul dalam persepsi yang memanfaatkan informasi deret waktu. Konsekuensi dari autokorelasi adalah perbedaan contoh tidak dapat menggambarkan fluktuasi populasi. Uji autokorelasi dipakai untuk mengetes model relaps jika variabel yang salah untuk setiap variabel otonom memiliki pengaruh yang berbeda. Apabila tidak terjadi regresi maka model regresi tersebut dikatakan baik. Dasar pengambilan keputusan dari ada tidaknya autokorelasi dapat memakai nilai Durbin Watson (Husna, 2015).

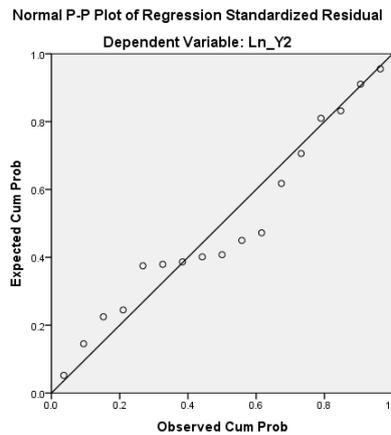
Untuk mengetahui tingkat signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat digunakan pengujian statistik yang meliputi analisis statistik R square (R^2), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas adalah sejenis metode pendeteksian yang menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dari metode deteksi ini adalah untuk menentukan apakah model itu akurat atau tidak. Titik-titik pada

Gambar 1 berada di sepanjang garis dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari grafik p-plot bahwa model regresi ada dan data penelitian berdistribusi normal.



Gambar 1. Uji Normalitas Data

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3, jelas bahwa tidak ada multikolinearitas dalam penelitian ini karena setiap satu dari empat indikator inflasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, dan memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

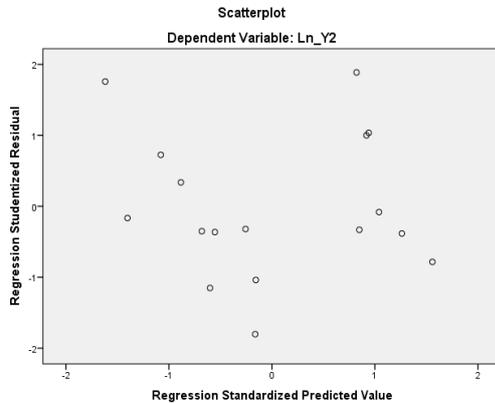
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.562	1.780
X2	.474	2.111
Ln_X3	.517	1.935
Y1	.656	1.524

a. Dependent Variable: Ln_Y2

Sumber Data: BPS Bulukumba Dalam Angka 2022

Uji heteroskedastisitas berusaha menjawab pertanyaan apakah residual satu pengamatan dalam model regresi memiliki varians yang berbeda dari pengamatan lainnya. Menyelidiki grafik scatterplot merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas. Tidak ada indikasi heteroskedastisitas apabila gambar scatterplot tidak menunjukkan pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas, bawah, kanan, dan kiri angka 0 pada sumbu y. Gambar 2 secara nyata memperlihatkan bahwasanya tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena plotting atau titik-titik

tidak mengikuti pola tertentu. Uji asumsi autokorelasi berusaha untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dalam model regresi linier. Nilai Durbin Watson diperiksa untuk memastikan hubungan dalam model regresi. Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson penelitian sebesar 1,262 berkisar antara -2 hingga +2, menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi.



Tabel 4. Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.943 ^a	.889	.852	1.262

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Gambar 1.2. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Uji Hipotesis

Model 1 (Y₁)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa hasil pengujian mempunyai signifikansi positif pada orde $0,129 > 0,05$, sehingga hasil tersebut dianggap cukup untuk sampai pada suatu kesimpulan, dengan syarat variabel yang tidak relevan yaitu inflasi, tenaga kerja kekuatan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Secara signifikan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak diterima.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan Model I

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22.800	3	7.600	2.270	.129 ^b
1 Residual	43.532	13	3.349		
Total	66.332	16			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Ln_X3, X1, X2

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 6 Uji Parsial (Uji t), masing-masing variabel bebas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tingkat signifikan $0,156 > 0,05$, menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang kecil namun menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa teori

penelitian ini diterima. Pengaruh Angkatan Kerja (X2) adalah negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,176 > 0,05$ untuk variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti atau ditolak. Sedangkan pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X3) adalah positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan tingkat signifikansi $0,190 > 0,05$ untuk variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti atau ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial Model I

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
X1	.347	.231	.416	1.505	.156
X2	-5.111E-5	.000	-.434	-1.431	.176
Ln_X3	1.356	.980	.404	1.384	.190

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,344, artinya ketiga variabel inflasi, partisipasi angkatan kerja, dan belanja pemerintah memberikan kontribusi sebesar 34,4% terhadap pertumbuhan ekonomi dan sisanya sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel tambahan yang tidak tercantum dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.586 ^a	.344	.192	1.82991

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Model 2 (Y₂)

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa hasil uji simultan memiliki nilai signifikansi $0,00 < 0,05$; Oleh karena itu, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu inflasi, partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan Model II

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.399	4	4.350	24.002	.000 ^b
	Residual	2.175	12	.181		

Total	19.573	16
a. Dependent Variable: Ln_Y2		
b. Predictors: (Constant), Y1, Ln_X3, X1, X2		

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9 mengungkapkan hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Variabel inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,431 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan ketika inflasi meningkat maka Pendapatan Asli Daerah menurun. Hasilnya, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini terbantahkan, dan disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian hipotesis dalam penelitian ini ditolak karena variabel angkatan kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,886 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan bahwa dengan bertambahnya angkatan kerja maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini diterima karena variabel pengukuran pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Akibatnya, ketika pengeluaran pemerintah meningkat, Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Terakhir, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka Pendapatan Asli Daerah turun. Hasilnya, hipotesis nol penelitian ini didukung oleh tingkat signifikansi variabel sebesar $0,114 > 0,05$.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial Model II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
X1	-.047	.058	-.105	-.814	.431
X2	1.308E-6	.000	.020	.146	.886
Ln_X3	1.508	.244	.827	6.178	.000
Y1	-.110	.065	-.202	-1.703	.114

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.943 ^a	.889	.852	.42570
---	-------------------	------	------	--------

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,889 yang menunjukkan bahwa keempat variabel inflasi, angkatan kerja, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi menyumbang 88,9% dari Pendapatan Asli Daerah, sisanya sebesar 11,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Analisis Jalur

Peneliti membangun hubungan antar variabel menggunakan hasil analisis regresi. Di bawah ini adalah kerangka analitik yang dapat digunakan untuk memahami hasil yang diberikan dalam tabel, yang mencakup nilai koefisien dan derajat signifikansi yang dapat diatribusikan pada pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan model struktural pada persamaan 3 dan 4, dapat ditulis kembali persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Model 1: } Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + e_1$$

$$Y_1 = -23.395 + 0,416X_1 - 0,434X_2 + 0,404X_3 + 0,809 \dots (13)$$

Dari persamaan 13, diperoleh nilai koefisien α_0 yaitu sebesar -23.395 artinya apabila variabel inflasi (X_1), angkatan kerja (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi (Y_1) akan mengalami penurunan sebesar 23.395. selanjutnya, nilai koefisien α_1 yaitu sebesar 0,416. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi (X_1) maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,416 dengan asumsi angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah konstan. Kemudian, nilai koefisien α_2 yaitu sebesar -0,434. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan angkatan kerja (X_2) maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,434 dengan asumsi inflasi dan pengeluaran pemerintah konstan dan nilai koefisien α_3 yaitu sebesar 0,404. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah (X_3) maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,404 dengan asumsi inflasi dan angkatan kerja konstan.

$$\text{Model 2: } Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Y_1 + e_2$$

$$Y_2 = -16.154 - 0,105X_1 + 0,020X_2 + 0,827X_3 - 0,202Y_1 + 0,333 \dots (14)$$

Model 2 memperlihatkan nilai koefisien β_0 yaitu sebesar -16.154 artinya apabila variabel variabel inflasi (X_1), angkatan kerja (X_2), pengeluaran pemerintah (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak mengalami perubahan maka Pendapatan Asli Daerah (Y_2) akan mengalami penurunan sebesar 16.154. Nilai koefisien β_1 yaitu sebesar -0,105. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi (X_1) maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,105 dengan asumsi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi konstan. Kemudian, nilai koefisien β_2 yaitu sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan angkatan kerja (X_2) maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,020 dengan asumsi inflasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi konstan. Selanjutnya, nilai koefisien β_3 yaitu sebesar 0,827. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah (X_3) maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,827 dengan asumsi inflasi, angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi konstan, dan nilai koefisien β_4 yaitu sebesar -0,202. Hal ini

menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi (Y1) maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,202 dengan asumsi inflasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah konstan.

Pembahasan

Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,156 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,416 yang menunjukkan bahwa antara tahun 2005 dan 2020 inflasi berpengaruh negatif dan berdampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ekonomi tidak selalu terkena dampak negatif inflasi, secara teori. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa peningkatan inflasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tidak secara signifikan. Apalagi jika inflasi kurang dari 10%. Kenaikan harga yang kecil tentu saja dapat memperdalam pertumbuhan ekonomi. Itu karena jika uang mengasapi dapat memberikan kenyamanan pengusaha untuk tujuan ini, meningkatkan produksi bersama. Pemilik bisnis ingin memperluas manufaktur, karena begitu harga melambung, pengusaha mengambil alih kepemilikan. Selain itu, peningkatan manufaktur memiliki dampak positif lain: penciptaan lapangan kerja baru (Septiatin dkk, 2020). Temuan penelitian ini (Indriyani, 2016) menyoroti dampak positif inflasi terhadap perekonomian Indonesia dari tahun 2005 hingga 2015, menurut Hasil Penelitian. Selain itu, studi tentang inflasi (Pramesthi, 2012) menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Trenggalek diuntungkan dari inflasi. Selain itu, penelitian oleh Pramesti & Yasa (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Klungkung juga diuntungkan oleh inflasi.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil penelitian, dampak angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0,176 di atas 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,434, menunjukkan bahwa akan berdampak negatif dan kecil terhadap pertumbuhan tersebut di Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 dan 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanda negatif (-) menunjukkan adanya hubungan yang mengikat antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan angkatan kerja. Apabila penduduk terus bertambah banyak maka perekonomian akan menderita, karena produktivitas setiap penduduk akan lebih rendah. Sebagai akibat tingkat kemakmuran masyarakat menurun, perekonomian dapat mencapai tingkat produktivitas yang tidak stabil. Menurut (Supriadi, 2020) penelitian yang dilakukan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja berdampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Menurut penelitian oleh (Harahap & Amanda, 2022), juga mengatakan angkatan kerja Sumatera barat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005

dan 2020, dengan nilai signifikansi 0,190 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,404. Porsi yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur akan meningkat seiring dengan meningkatnya belanja langsung pemerintah. Pelayanan publik yang lebih baik dan infrastruktur yang sesuai seharusnya memudahkan kegiatan ekonomi berlangsung, yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk mengendalikan perekonomian, pemerintah harus memainkan peran penting. Salah satu peran pemerintah dalam menjaga ketertiban moneter adalah melaksanakan kebijakan fiskal dengan menyalurkan dana masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan layanan penting masyarakat. Cara terbaik bagi pemerintah untuk campur tangan dalam perekonomian adalah melalui pengeluaran (Wahyuni dkk., 2014). Temuan ini sejalan dengan temuan Erjergit dkk (2021) bahwa belanja pemerintah saling menguntungkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong. Dan (Anitasari & Soleh, 2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi pertumbuhan industri Provinsi Bengkulu. Temuan studi ini akan lebih didukung oleh fakta bahwa pengeluaran pemerintah telah memperkuat pertumbuhan Bali (Wahyuni et al. 2014).

Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,431 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,105 yang menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bersifat negatif dan tidak signifikan untuk Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 dan 2020. Ketika mempertimbangkan modifikasi tarif, tingkat inflasi harus diperhitungkan. Misalnya, dengan menetapkan tarif tetap untuk pajak dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba tidak terpengaruh terlepas dari seberapa tinggi atau rendah tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan. Karena tingkat inflasi seharusnya hanya diperhitungkan ketika mengubah tarif. Karena itu, Kabupaten Bulukumba tidak terpengaruh oleh variabel inflasi yang seharusnya berdampak pada pendapatan PAD. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Batik (2013) yang menemukan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, berapa pun besarnya inflasi yang terjadi, tingkat PAD tidak akan berubah. Menurut penelitian Eni Aryanti dan Indarti (2012), inflasi berdampak merugikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun

Dilihat dari hasil penelitian diketahui bahwa angkatan kerja mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,886 atau lebih 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,020 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah harus memperhitungkan ketersediaan tenaga kerja jika ingin memperluas PAD. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PAD akan meningkat dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, jika pekerja yang tersedia lebih sedikit, PAD akan berkurang. Menurut penelitian Triyanto (2017), jumlah penduduk pada kelompok usia produktif berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat. Dengan kata lain, dengan bertambahnya penduduk suatu wilayah dan semakin

produktif, jumlah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah meningkat seiring dengan itu, meningkatkan pendapatan suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan penelitian Tianto (2022), yang menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba

Sesuai dengan temuan penelitian, belanja daerah berpengaruh 0,000 terhadap pendapatan daerah yang diketahui memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, dan nilai koefisien regresi sebesar 0,827 yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah memang positif dan signifikan. Dampak Kabupaten Bulukumba Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2020. Menurut Halim dalam Kurniawan dkk. (2018), pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi pendapatannya untuk mencapai kemandirian daerah, dan salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan porsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pengembangan sektor-sektor produktif di daerah, yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini mendukung temuan penelitian lain oleh Tobing (2015) yang menemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap PAD. Menurut kajian Ramadhan dan Syahidin (2020), belanja pemerintah berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba antara tahun 2005 hingga 2020, dengan nilai signifikansi 0,114 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi -0,202. Sejalan dengan pemikiran mazhab yang mempertahankan ekspansi ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan meningkat berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi secara keseluruhan serta meningkatnya nilai yang diberikan oleh masing-masing subsektor ekonomi individu. Meskipun demikian, salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba tidak berdampak besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Kartika & Drajad, 2020), produktivitas ekonomi Penduduk Asli Daerah di Kabupaten Berau tidak signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2017) mengungkapkan bahwa tidak ada sektor ekonomi yang terkait pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan temuan penelitian, biaya langsung inflasi terhadap pendapatan kota adalah -0,105, sedangkan pengaruhnya melalui pertumbuhan ekonomi adalah -0,084. Ini menggambarkan bahwa nilai dampak tidak langsung mengalahkan nilai dampak langsungnya. Akibatnya, ekspansi ekonomi dan inflasi tidak langsung berdampak negatif dan besar terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tinjauan pustaka, angkatan kerja memang berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,020, sedangkan variabel kualitatif angkatan kerja terhadap usaha. perusahaan karena pertumbuhan ekonomi diperkirakan 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dampak tidak langsung sama dengan harga dampak langsungnya. Dengan demikian, angkatan kerja memiliki dampak yang menguntungkan dan besar terhadap pendapatan kota secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan temuan studi tersebut, pengaruh langsung investasi pemerintah terhadap konsesi pajak daerah adalah 0,827, meskipun pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi adalah -0,081. Hal ini menggambarkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsungnya. Pengeluaran publik begitu positif dan tidak signifikan mempengaruhi pendapatan daerah melalui pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Inflasi dan Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba. Variabel pengeluaran pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba, sedangkan variabel Inflasi berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba, dan pertumbuhan ekonomi berhubungan negative namun signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba.

REFERENSI

- 'Ulum, A. M. (2011). *Tentang Jizyah Dalam Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'Ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri*.
- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah Dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50.
- Akasumbawa, M. D. D. (2021). Pengaruh Pendidikan, Angka Harapan Hidup Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia. *Riset, Ekonomi, Akuntansi ...*, 2(1). <https://Journal.Universitasbumigora.Ac.Id/Index.Php/Rekan/Article/View/1047>

- Aliyasa, S. K. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 24–55.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Management : Small And Medium Enterprises (Smes)*, 13(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Jumlah Penduduk Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.015>
- Asmuruf, Makdalena F Rimate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>
- Bayon, T., Robin, L., Jonathan, & Latif, I. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kutai Barat. *Ekonomia*, 5(1), 367–371.
- Bps Bulukumba. (2020). *Bulukumba Dalam Angka 2020*.
- Darma, B. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupten Tebo Tahun 2016-2020. *Stie-Gk Muara Bulian*, 2(1), 90–100.
- Desmawati, A., Zamzami, & Zulgani. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49–58. <https://online-journal.unja.ac.id/jes/article/view/2638/pdf>
- Dua, P. (2009). Determination Of Inflation In An Open Economy Phillips Curve Framework: The Case Of Developed And Developing Asian Countries. *Macroeconomics And Finance In Emerging Market Economies*, 3(1), 33–51. <https://doi.org/10.1080/17520840903498107>
- Harnita, Astuty, S., & Samsir, A. (2020). Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Ecces (Economics, Social, And Development Studies)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9544>
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–158. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1989>
- Henriansa. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota*

Parepare. 17–28.

- Hidayati, N. (2018). 'Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V1i1.4696>
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Husna, U. (2015). *Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Derah Kota Se Jawa Tengah*. 2–61.
- Idwal. B. (2013). *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*. 1–19.
- Imanuel, A. N. (2014). *Analisis Pendapatan Dan Angkatan Kerja Terhadap Urbanisasi Di Kota Bengkulu*. Universitas Bengkulu.
- Laely, S. (2018). *Unsur-Unsur Sistem Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Miragustia Mayza, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 9–16.
- Muslim, C., Mallongi, S., & Rahman, Z. (2019). Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia*, 2(3), 57–65. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/Paradoks/Article/Download/220/141/>
- Mutiah. (2019). *Pengaruh Angkatan Kerja Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kota Sumatera Utara Tahun 2011-2017*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117–122. <https://doi.org/10.31949/Mr.V1i2.1134>
- Nasir, M. S. (2019). *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah*. 2(1).